



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam era globalisasi, komitmen pemerintah untuk mewujudkan Good Government dan Clean Government semakin kuat. Hal tersebut sesuai dengan harapan stake holders Pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat internasional dan termasuk rakyat pada umumnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, profesional, transparan, akuntabel dan bebas KKN. Tuntutan tersebut telah diakomodasikan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan penyelenggara Pemerintahan pusat dan daerah untuk menyusun LAKIP setiap akhir tahun anggaran mulai tahun anggaran 2000.

Dilandasi kesadaran yang sangat mendalam akan pentingnya akuntabilitas publik baik bagi manajemen maupun bagi stakeholders, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2018 yang mengacu kepada Pedoman Penyusunan LAKIP yang diterbitkan oleh LAN sebagai laporan akuntabilitas atas hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018. Laporan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang mengungkapkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran organisasi. Di samping itu, LAKIP juga mengungkapkan faktor pendukung keberhasilan, hambatan pencapaian sasaran serta strategi perbaikan di masa mendatang.



Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran yaitu tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 99 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, dengan realisasi keuangan sebesar 94,95 %. Dari 7 (Tujuh) sasaran yang ditetapkan, 6 (Enam) sasaran telah mencapai target, bahkan ada 2 (dua) sasaran yang melewati target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) sasaran realisasinya masih dibawah target, namun dengan realisasi masih cukup baik yaitu 68%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tak lepas dari hasil kerja keras segenap perangkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang serta partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan cita-cita daerah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan peningkatan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan. Karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP di masa yang akan datang.



BAB I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang bersih (Good Governance) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita cita bangsa dan negara, untuk itu diperlukan pertanggung jawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good governance dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara di mata publik. Di sisi lain, terselenggaranya good governance merupakan indikator terciptanya clean goverment. Sebagai salah satu pilar good governance,



pertanggungjawaban (accountability) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sebagai sebuah organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban publik dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP yang disusun merupakan pertanggungjawaban tahunan atas Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 yang juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Sebagai implikasi dari pemberlakuan UU Nomor 34 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 tahun 2016, maka organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Enrekang



Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.

Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan;
 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Pertamanan dan RTH;
 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; .
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup;
 3. Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 1. Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;



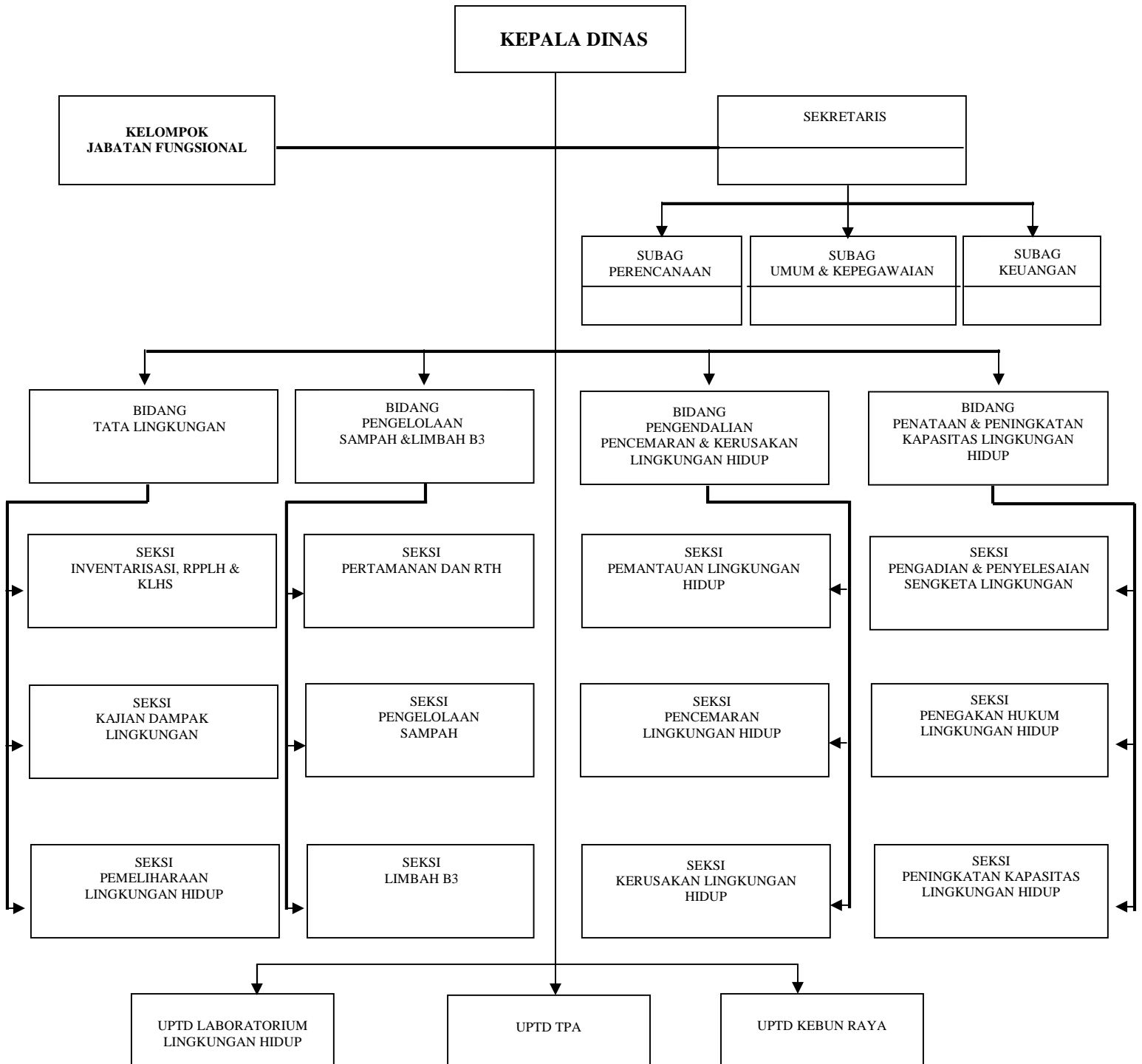
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

g. Jabatan Fungsional.

Adapun skema struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang dapat dilihat pada gambar 1.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENREKANG



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kab. Enrekang



Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 43 tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;



- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan dan menyelenggaraan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- i. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan daerah kabupaten;



- j. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- k. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;
- l. menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- m. menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup;
- o. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan stakeholders (DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang tahun 2018 mencakup hal-hal berikut ini:

- J) Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas

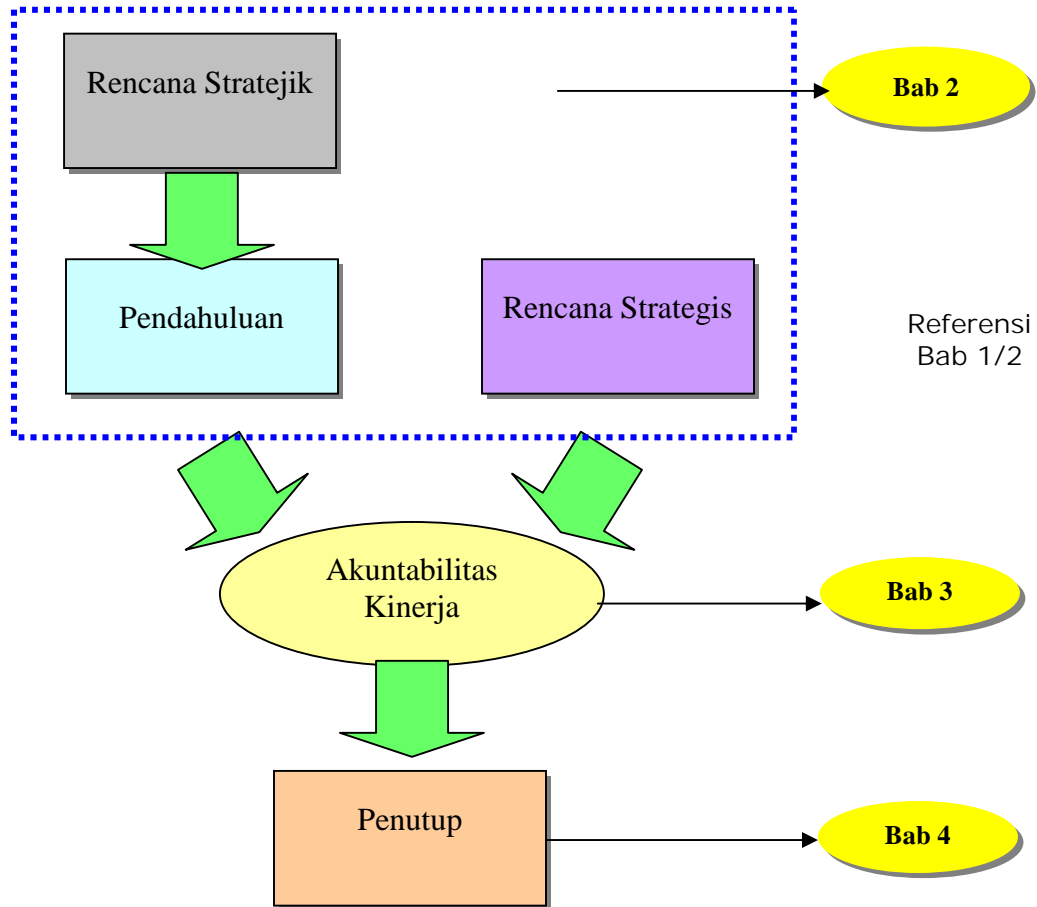


Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategik telah dicapai selama tahun 2018

- J) Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sebagai upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja kedepan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. SISTEMATIKA LAKIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang selama tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dapat diilustrasikan dalam Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Bagan Sistematika Penyajian LAKIP



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2018 ini

Bab II – Rencana Strategis, menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang periode 2014-2018 dan rencana kinerja untuk tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN STRATEJIK

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiap tahunnya tertuang dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan lampiran dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang tahun 2018 ini.

1. Rencana Stratejik

Rencana Stratejik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan.

Di samping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran stratejik pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, Renstra dipandang sebagai:



1. Memberikan pedoman/arah bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang.
2. Menyediakan tolak ukur yang jelas bagi evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang.
3. Mengantisipasi perubahan secara efektif dan proaktif dalam lingkungan strategis yang semakin kompleks, selalu berubah dan berkembang.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan.
5. Memudahkan para stakeholders dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah.
6. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara berbagai stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan.

Renstra sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik. Dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran stratejik serta strategi pencapaiannya (kebijakan dan program).



A. VISI DAN MISI

1) VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dijabarkan sebagai

“Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang
Seimbang Menuju Enrekang Maju, Aman Sejahtera
Pada Tahun 2018”

2) MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka suatu organisasi harus merumuskan misi. Misi organisasi adalah identifikasi tentang langkah-langkah utama yang akan diambil untuk mendukung pencapaian visi. Misi dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya pokok yang ditentukan untuk dapat mewujudkan kondisi/keadaan yang diharapkan visi. Adapun misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :



1. Mengoptimalkan pengelolaan persampahan
2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengawasan serta penegakan hukum
3. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan sumber-sumber air
4. Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
5. Meningkatkan intergritas pemangku kebijakan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

B. TUJUAN/SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang menggambarkan arah strategik dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Persampahan
2. Mewujudkan Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengawasan serta penegakan hukum lingkungan
3. Mewujudkan Upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Sumber-Sumber Air
4. Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel.
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan Yang Nyaman, Segar, Indah dan Bersih



Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang adalah hal-hal yang diharapkan dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan capaian-capaian antara yang diperlukan dalam rangka merealisasikan tujuan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan

Indikator Sasaran ini adalah :

- a. Presentase Timbulan Sampah Yang Terangkut.
- b. Cakupan Layanan Persampahan

2. Terwujudnya pengendalian pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan

Indikator Sasaran ini adalah :

- a. Rasio perusahaan yang memiliki kajian mengenai dampak lingkungan (Amdal, UKL, UPL)
- b. Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air
- c. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

3. Terwujudnya pengendalian kerusakan hutan dan lahan

Indikator Sasaran ini adalah :



- a. Prosentase pengendalian kerusakan hutan dan lahan secara berkelanjutan untuk peningkatan sumber daya alam
4. Tersedia dan teraksesnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat
Indikator Sasaran ini adalah :
 - a. Prosentase pelaksanaan akses informasi SDA dan LH dalam pengelolaan LH
5. Terwujudnya Pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan
Indikator Sasaran ini adalah :
 - a. Prosentase upaya pengembangan dan pemeliharaan RTH dalam wilayah perkotaan
6. Terwujudnya pengembangan dan penataan serta pemeliharaan taman-taman kota dan taman kebun raya Maiwa
Indikator Sasaran ini adalah :
 - a. Prosentase pengembangan taman-taman kota dan kebun raya Maiwa
7. Meningkatnya konservasi tumbuhan endemik Sulawesi
Indikator Sasaran ini adalah :
 - a. Meningkatnya tanaman koleksi Kebun Raya Maspul

C. CARA MENCAPAI TUJUAN

1. Strategi

Untuk mencapai visi pembangunan di bidang Lingkungan Hidup, maka dilakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program selama lima tahun kedepan menggunakan telaahan SWOT.



Telaahan ini menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor identifikasi faktor kekuatan, peluang kendala dan tantangan serta dengan menggunakan analisa SWOT, diperoleh alternatif-alternatif strategi jangka menengah pembangunan Lingkungan Hidup melalui 4 (empat) pengelompokan sebagai berikut :

1. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
4. Strategi mengurangi kelemahan dan menghadapi tantangan / ancaman;

Dalam upaya mencapai sasaran jangka menengah pembangunan Lingkungan Hidup 2014-2018 di Kabupaten Enrekang yang realistis dan proporsional ditetapkan asumsi-asumsi dasar. Asumsi dasar tersebut dijadikan pertimbangan dalam menganalisa masing-masing strategi yang tertuang pada SWOT.

Strategi dimaksud sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Terintegrasi.
2. Meningkatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (LH) sejak dini.



3. Mengoptimalkan dukungan dan peran serta stake holder dalam penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan dan penerapannya.
4. Melaksanakan Pemeriksaan kualitas lingkungan (udara, air dan tanah) secara rutin.
5. Penyediaan informasi dan data yang mudah diakses masyarakat.
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah.
7. Penataan lingkungan melalui ruang terbuka hijau (RTH) serta pengelolaan taman – taman kota.

2. Kebijakan

Pada dasarnya kebijakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk mendukung perwujudan agenda dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014 – 2018. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, maka dibutuhkan sinkronisasi antara kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dengan agenda dan kebijakan pembangunan Kabupaten Enrekang.

Dengan demikian maka kebijakan Dinas Lingkungan Hidup sebagai strategi pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan agenda dan kebijakan daerah adalah :

1. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat.



3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan, pengendalian (penanggulangan dan pemulihan) dan pengawasan.
 4. Penerapan penegakan hukum lingkungan.
 5. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup.
 6. Peningkatan kualitas data dan informasi lingkungan.
 7. Peningkatan system pengelolaan sampah.
 8. Peningkatan penataan Lingkungan.
3. Program dan Kegiatan

Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah disepakati dan dilegalisasi. Kegiatan yang disusun tetap memperhatikan aspek lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Penjabaran program operasional pada kegiatan telah disusun sebagai berikut :

I. Program Pengembangan Kinerja Persampahan

Rincian kegiatan sebagai berikut. :

- 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
- 2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan dan Sarana Persampahan

II. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rincian kegiatan sebagai berikut. :

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
2. Pemantauan Kualitas Lingkungan



3. Pembinaan/Pengembangan dan Pengawasan AMDAL, UKL-UPL
4. Koordinasi dan Pengawasan B3 dan Limbah B3
5. Pemantauan dan Pengawasan kerusakan lingkungan
6. Penyusunan laporan pemantauan kerusakan lahan untuk produksi biomassa
7. Pelayanan perizinan bidang tata lingkungan

III. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Rincian kegiatan sebagai berikut. :

1. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
2. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
3. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
5. Pelaksanaan Pameran Lingkungan Hidup

IV. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Rincian kegiatan sebagai berikut. :

1. Penataan RTH
2. Pemeliharaan RTH

V. Program Pengelolaan dan Penataan Keindahan Kota

Rincian kegiatan sebagai berikut. :

1. Pemeliharaan Taman, Fasilitas Taman dan Trotoar
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pertamanan Serta Fasilitas Lainnya



- VI. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Rincian kegiatan sebagai berikut. :
1. Pembinaan dan penataan sekolah ADIWIYATA
- VII. Program Pengembangan Kawasan Konservasi
Rincian kegiatan sebagai berikut. :
- 1 Pembuatan dan pengembangan kebun raya massenrenpulu
 - 2 Pembangunan sarana prasarana kebun raya massenrempulu
 - 3 Promosi wisata kebun raya massenrempulu
- VIII. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rincian kegiatan sebagai berikut. :
1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 5. Koordinasi, konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan
 6. Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran
 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor
- IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rincian kegiatan sebagai berikut. :
1. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

X. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rincian kegiatan sebagai berikut. :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

XI. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rincian Kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi bagi PNS

XII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Rincian kegiatan sebagai berikut. :

1. Penyusunan LAKIP

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran
& Akhir Tahun

XIII. Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
SKPD

Rincian kegiatan sebagai berikut. :

1. Penyusunan Rencana Kerja

2. Penyusunan RKA SKPD

3. Penyusunan DPA SKPD

2. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (Yearly Performance Plan). Rencana kinerja tersebut merupakan penjabaran target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai



kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan dalam mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja tahun 2018 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Sasaran stratejik tahun 2018, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut:



LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	1	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	90
		2	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	%	100
		3	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Sesuai Tupoksi	%	75
		4	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100
		5	Terwujudnya Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	%	100
2	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan	1	Persentase Timbulan sampah yang terangkut pada wilayah-wilayah kota terlayani	%	75
		2	Cakupan Layanan Pengangkutan Persampahan	Jiwa	34.480
3	Terwujudnya Pengendalian Pencemaran, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1	Persentase Perusahaan/Kegiatan yang memiliki kajian mengenai dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)	%	60
		2	Persentase Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	90
		3	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100
4	Tersedia dan teraksesnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat	1	Prosentase pelaksanaan akses informasi SDA dan LH dalam pengelolaan LH	%	75
5	Terwujudnya Pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan	1	Prosentase upaya pengembangan dan pemeliharaan RTH dalam wilayah perkotaan	%	75
6	Terwujudnya pengembangan dan penataan serta pemeliharaan taman-taman kota dan taman kebun raya Maiwa	1	Prosentase pengembangan taman-taman kota dan kebun raya Maiwa	%	100
7	Meningkatnya Konservasi Tumbuhan endemik Sulawesi	1	Terbangunnya Tanaman Koleksi Kebun Raya	Spec.	706



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP tahun 2018 bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas publik. Pengukuran capaian kinerja tahun 2018, berpedoman pada SK LAN Nomor 239/ IX / 6 / 8 / 2003 dengan terlebih dahulu menetapkan indikator-indikator kinerja, yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil). Sedangkan indikator benefit (manfaat) dan impact (dampak) belum bisa diukur pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, akan tetapi sangat terkait dengan kegiatan lainnya. Selain itu, untuk pengukuran kedua indikator tersebut menggunakan metode penilaian tersendiri yang terkait dengan evaluasi kebijakan setelah terlebih dahulu membangun sistem pengumpulan data secara memadai.

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab jika dijumpai celah kinerja (performance gap) serta upaya-upaya perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak



eksternal tentang sejauh mana misi suatu organisasi telah diwujudkan.

Ikhtisar pengukuran kinerja keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategik dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Lampiran 1. Sedangkan pengukuran kinerja kegiatan dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Lampiran 2.

2. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum dari sasaran strategik yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi.

a. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategik

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 7 (Tujuh) sasaran yang telah ditetapkan, 6 (enam) sasaran telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat Impact.



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang tahun 2018 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada seluruh kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Dengan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja, maka indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan sumber data dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja. Realisasi capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 99 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Berdasarkan Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dan Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, maka capaian kinerja sasaran strategik secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	90	90	100,00
2	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	%	100	100	100,00
3	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Sesuai Tupoksi	%	75	75	100,00
4	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100,00
5	Tewujudnya Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	%	100	100	100,00



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang di tahun 2018 telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran melalui pelaksanaan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Koordinasi, konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan
- Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran
- Penyediaan Peralatan Kebersihan & Perlengkapan Dapur Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan keuangan bulan, triwulan semesteran dan akhir tahun
- Penyusunan RKA SKPD
- Penyusunan DPA SKPD
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD



Dari 5 (Lima) indikator kinerja sasaran, yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran tersebut kesemuanya mencapai target yang telah ditetapkan.

2 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan adalah sebagai berikut :

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Persentase Timbulan sampah yang terangkut pada wilayah-wilayah kota terlayani	%	75	60,73	80,97
2	Cakupan Layanan Pengangkutan Persampahan	Jiwa	34.480	47.200	136,89

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Dari 2 (dua) indikator kinerja, yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran tersebut, 1 (satu) indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.



3

Terwujudnya Pengendalian Pencemaran, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Persentase Perusahaan/Kegiatan yang memiliki kajian mengenai dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)	%	60	80	133,33
2	Persentase Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	90	100	111,11
3	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00

Dari 3 (Tiga) indikator kinerja, yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran Terwujudnya Pengendalian Pencemaran, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan seluruhnya telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Target tersebut tercapai melalui kegiatan:

- Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Pembinaan/pengembangan dan pengawasan AMDAL UKL-UPL
- Koordinasi dan Pengawasan B3 dan Limbah B3
- Pemantauan dan pengawasan kerusakan lingkungan
- Penyusunan laporan pemantauan kerusakan lahan untuk produksi biomassa
- Pelayanan perizinan bidang tata lingkungan



4

Tersedia dan teraksesnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Prosentase pelaksanaan akses informasi SDA dan LH dalam pengelolaan LH	%	75	75	100,00

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Tersedia dan teraksesnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
- Monitring, evaluasi dan Pelaporan
- Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dampak perubahan iklim
- Pelaksanaan Pameran Lingkungan Hidup

Dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, sudah mencapai target yang telah ditetapkan.



5

Terwujudnya Pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Prosentase upaya pengembangan dan pemeliharaan RTH dalam wilayah perkotaan	%	75	75	100,00

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Terwujudnya Pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penataan RTH
- Pemeliharaan RTH
- Pembinaan dan Penataan Sekolah Adiwiyata

Dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan.

6

Terwujudnya pengembangan dan penataan serta pemeliharaan taman-taman kota dan taman kebun raya Maspul

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :



	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Prosentase pengembangan taman-taman kota dan kebun raya Maspul	%	100	100	100,00

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Terwujudnya pengembangan dan penataan serta pemeliharaan taman-taman kota dan taman kebun raya Maspul melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pemeliharaan Taman, Fasilitas Taman dan Trotoar
- Pembangunan Tugu dan Taman Sesuai Potensi Daerah
- Pengadaan Sarana dan Peralatan Pengelolaan Pertamanan Serta Fasilitas Lainnya

Dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan.

7 Meningkatnya Konservasi Tumbuhan Endemik Sulawesi

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Terbangunnya Tanaman Koleksi Kebun Raya	Species	706	480	68

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Meningkatnya Konservasi



Tumbuhan Endemik Sulawesi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pembangunan sarana dan prasarana kebun raya maspul
- Promosi wisata kebun raya maspul
- Pembuatan dan pengembangan kebun raya maspul

Dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, belum mencapai target disebabkan karena lebih fokus pada pemeliharaan tanaman koleksi yang sudah ada, sehingga penambahan tanaman koleksi tidak signifikan.

b. Strategi pemecahan masalah

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menetapkan strategi-strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan lebih mengacu pada Renstra dan Renja
- b. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan.
- c. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
- d. Meningkatkan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan agar berjalan tepat mutu tepat sasaran dan tepat waktu.



3. ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2018.

APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pendapatan diuraikan menurut sumber-sumber perolehan dana, sedangkan Belanja diuraikan menurut penggunaan dana, sedangkan pembiayaan diuraikan menurut penerimaan dan pengeluaran daerah.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	PENDAPATAN			
1.	Pendapatan Asli Daerah	55.000.000	50.420.000	91,67
	JUMLAH PENDAPATAN	55.000.000	50.420.000	91,67
II	BELANJA			
1.	Belanja Tidak Langsung	3.115.206.834	2.904.626.603	93,24
2.	Belanja Langsung	7.408.431.000	7.034.408.877	94,95
	JUMLAH BELANJA	10.523.637.834	9.939.035.480	94,44
	Surplus / Defisit	(10.468.637.834)	(9.888.615.480)	(94,45)
III	PEMBIAYAAN			
1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00

Target dan realisasi atas capaian keuangan per masing-masing kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:



NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (RP)	Realisasi Keuangan (Rp)	(%) Capaian
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.000.000	60.598.229	97,74
2	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
3	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	100,00
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	249.750.000	249.749.180	100,00
5	Koordinasi, konsultasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	138.000.000	137.850.000	99,89
6	Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran	1.892.025.000	1.888.920.000	99,84
7	Penyediaan peralatan keber sihan dan perlengkapan dapur kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	20.000.000	100,00
2	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/opersional	592.000.000	581.084.000	98,16
3	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan gedung kantor	15.000.000	15.000.000	100,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	48.000.000	48.000.000	100,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi PNS	130.000.000	130.000.000	100,00
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00



2	Penyusunan pelaporan keuangan bulan, triwulan dan semesteran	5.000.000	4.999.700	99,99
VI	Program Sinkronisasi Perencanaan/Penganggaran SKPD			
1	Penyusunan RKA SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
2	Penyusunan DPA SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	8.000.000	7.942.000	99,28
VII	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.735.500.000	1.628.140.500	93,81
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	600.000.000	596.576.449	99,43
VIII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	88.000.000	87.069.000	98,94
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	55.000.000	53.200.000	96,73
3	Pembinaan/pengembangan dan pengawasan AMDAL UKL-UPL	51.000.000	50.737.000	99,48
4	Koordinasi dan pengawasan B3 dan LB3	40.000.000	40.000.000	100,00
5	Pemantauan dan pengawasan kerusakan lingkungan	31.000.000	30.983.500	99,95
6	Penyusunan Laporan Pemantauan Kerusakan lahan untuk produksi Biomassa	27.000.000	26.882.000	99,56
7	Pelayanan Perizinan Bidang Tata Lingkungan	40.000.000	39.999.500	100,00
IX	Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
1	Pengembangan data dan informasi lingkungan Hidup	47.000.000	46.974.297	99,95



2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60.000.000	59.784.000	99,64
3	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	31.500.000	31.480.000	99,94
4	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dampak perubahan iklim	42.000.000	41.990.000	99,98
5	Pelaksanaan Pameran Lingkungan Hidup	9.200.000	9.169.000	99,66
X	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			
1	Penataan RTH	329.000.000	202.827.000	61,65
2	Pemeliharaan RTH	25.000.000	24.898.000	99,59
XI	Program Pengelolaan dan Penataan Keindahan Kota			
1	Pemeliharaan taman dan fasilitas taman kota dan trotoar	126.018.400	125.870.422	99,88
2	Pengadaan sarana dan peralatan pengelolaan pertamanan dan fasilitas lainnya	158.487.600	72.737.600	45,89
XII	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			
1	Pembinaan dan Penataan sekolah Adiwiyata	72.000.000	71.527.500	99,34
XIII	Pengembangan Kawasan Konservasi			
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebun Raya Masenrempulu	48.950.000	17.450.000	35,65
2	Promosi Wisata Kebun Raya Masenrempulu	22.000.000	22.000.000	100,00
3	Pembuatan dan Pengembangan Kebun Raya masenrempulu	560.000.000	559.970.000	99,99
J U M L A H		7.408.431.000	7.034.408.877	94,95



Berdasarkan capaian pendapatan 2018, diketahui bahwa realisasi pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sebesar 91,67 %, belum mencapai target yang ditetapkan. Pendapatan tersebut berasal dari retribusi kebun raya maspul, sedangkan realisasi kegiatan di tahun 2018 menggunakan anggaran sebesar 94,95 %, atau dari total anggaran kegiatan Rp. 7.408.431.000 terealisasi sejumlah Rp. 7.034.408.877

- Jumlah kegiatan terserap anggaran 100 % : 14 Kegiatan
- Jumlah Kegiatan terserap anggaran 80 – 99 % : 22 Kegiatan
- Jumlah Kegiatan terserap anggaran 70 – 79 % : 0 Kegiatan
- Jumlah Kegiatan terserap anggaran 60 – 69 % : 1 Kegiatan
- Jumlah Kegiatan terserap anggaran di bawah 60 %: 2 Kegiatan



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran. Dari 7 (Tujuh) sasaran dengan 14 indikator yang telah ditetapkan, hanya 2 (dua) indikator yang realisasinya dibawah 80 %, sedangkan selebihnya telah mencapai target, bahkan ada 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang realisasinya di atas 100%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan peningkatan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan agar berjalan tepat mutu tepat sasaran dan tepat waktu.



Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.